



Dinas Pertanian  
Kabupaten Cirebon



# LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Tahun 2023



 (0231) 320988

 [distan@cirebonkab.go.id](mailto:distan@cirebonkab.go.id)

 [distan.cirebonkab.go.id](http://distan.cirebonkab.go.id)

 Jl. Sunan Ampel No. 2, Sumber

## **KATA PENGANTAR**

Dinas Pertanian dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Petunjuk teknis tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memuat pencapaian dalam pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Tahun 2023. Laporan ini disusun untuk melihat keberhasilan, serta upaya apa saja yang telah dilakukan Dinas Pertanian sebagai sarana dalam melakukan penilaian kinerja untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tahun yang akan datang.

Sumber, Februari 2024

Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Cirebon



Dr. Alex Sulistyawan, S.H., M.Pd.I

Pembina Tk.I

NIP. 19750710 200801 1 002

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dinas Pertanian memiliki 1 sasaran strategis, sedangkan urusannya ada dua yaitu : (1) Urusan Pertanian yang memiliki 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 20 (dua puluh) sub kegiatan; dan (2) Non urusan Pertanian memiliki 1 (satu) program, 6 (enam) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Anggaran yang dimiliki sebesar Rp 50.965.389.942 dengan realisasi sebesar Rp 45.413.424.948 atau 89,11%. Sedangkan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 5.551.964.994.

Pencapaian efisiensi anggaran hampir semua kegiatan mencapai efisiensi, sedangkan kegiatan yang tidak mencapai efisiensi yaitu pada sub kegiatan (1) pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani tidak tercapai targetnya karena ada kegiatan DAK yang tidak dilaksanakan sehingga belanja jasa tenaga ahli tidak terserap. Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena tidak sesuai dengan hukum tata ruang; (2) pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan tidak mencapai target anggaran karena tidak cukupnya waktu untuk pelaksanaan belanja anggaran tambahan pembangunan jembatan.

Capaian kinerja sasaran strategis di Tahun 2023 sebesar 85,51%. Pada perbandingan realisasi produksi Tahun 2022 (474.771,21 ton) dan Tahun 2023 yaitu 468.974,92 ton, sedangkan untuk capaian produksi Tahun 2023 terhadap Tahun 2022 sebesar 98,77. Pencapaian Produksi di sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan) sampai Tahun 2023 sudah mencapai 79,65% dari target Renstra Tahun 2024.

Perbandingan Produksi untuk komoditas unggulan di Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat dan Nasional menunjukkan hasil sebesar:

(1) Kabupaten Cirebon produksi sebesar 468.845,92 ton; (2) Propinsi Jawa Barat sebesar 7.291.244,65 ton; (3) Produksi Nasional sebesar 44.527.821,39 ton.

Faktor yang menyebabkan produksi naik atau turun terhadap produksi Tahun lalu yaitu:

- a) Beras produksinya naik jika dibandingkan Tahun 2022, disebabkan karena (1) ada peningkatan index pertanaman, (2) bantuan pompanisasi, (3) luas tanam bertambah, (4) peningkatan penerapan teknologi, (5) pemupukan cukup.
- b) Bawang merah produksinya turun disebabkan karena (1) luas tanam menurun (2) alih komoditas, (3) tidak ada air karena kemarau.
- c) Cabai besar mengalami penurunan produksi karena (1) luas tanam berkurang, menjadikan produksi menjadi turun (2) musim panas ekstrim berdampak sulit air.
- d) Mangga produksinya menurun disebabkan oleh (1) cuaca terlalu panas membuat bunga/bakal buah banyak yang terbakar/mengering, (2) banyak bunga/bakal buah yang gagal berkembang, (3) jumlah tanaman yang menghasilkan berkurang.
- e) Gula menunjukkan penurunan produksi dari Tahun 2022 disebabkan karena (1) kebakaran lahan, (2) cuaca ekstrim, (3) keterlambatan tebangan, (4) mahalnya sarana produksi pertanian, (5) kekurangan tenaga tebang pada musim tebang, (6) alih komoditas, (7) alih fungsi lahan.
- f) Daging unggas lokal produksinya meningkat jika dibandingkan Tahun 2022, disebabkan karena adanya peningkatan konsumsi dari masyarakat dan adanya peningkatan populasi ternak.
- g) Daging domba mengalami penurunan disebabkan oleh (1) adanya peningkatan harga sehingga daya beli masyarakat menurun, (2)

peternak masih banyak yang takut beternak domba akibat penyakit PMK di Tahun 2022, (3) daya beli masyarakat saat kurban menurun di Tahun 2023.

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Struktur Organisasi.....	2
1.2 Tugas dan Fungsi.....	5
1.3 Isu-Isu Strategis.....	5
1.4 Keadaan Pegawai.....	7
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	10
1.6 Keuangan.....	14
1.7 Sistematisasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	14
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>17</b>
2.1 Perencanaan Strategis.....	17
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	17
2.1.2 Sasaran Perangkat Daerah.....	18
2.1.3 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	20
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	25
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023.....	27
2.3.1 Target Belanja Dinas Pertanian.....	27
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	27
2.4 Instrumen Pendukung.....	32
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>35</b>
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023.....	35
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	37
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya.....	42
3.4 Realisasi Anggaran.....	43
3.5 Inovasi.....	63
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	64

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

1.1	Nilai Tukar Petani menurut subsektor Tahun 2022 dan 2023..	6
1.2	Daftar pegawai berdasarkan jenjang kepegawaian Tahun 2023.....	7
1.3	Distribusi jenjang pendidikan PNS di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.....	8
1.4	Distribusi jenjang pendidikan PPPK di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.....	9
1.5	Distribusi jenjang pendidikan tenaga honorer di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.....	9
1.6	Distribusi PNS menurut pangkat/golongan.....	9
1.7	Distribusi PPPK menurut pangkat/golongan.....	10
1.8	Sarana dan Prasarana di Dinas Pertanian.....	10
1.9	Keuangan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2023.....	14
2.1.	Sasaran dan indikator kinerja sasaran Dinas Pertanian.....	18
2.2.	Target sasaran di Rencana Strategis Tahun 2019-2024.....	18
2.3.	Strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian.....	19
2.4.	Strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian.....	20
2.5.	Perjanjian kinerja Tahun 2023.....	26
2.6.	Perubahan perjanjian kinerja Tahun 2023.....	26
2.7.	Target belanja Dinas Pertanian dari APBD Perubahan Tahun 2023.....	27
2.8.	Anggaran belanja di Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2023..	28
3.1.	Skala nilai peringkat kinerja.....	35
3.2.	Target sasaran, dan indikator kinerja Dinas Pertanian dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2024.....	36
3.3.	Target tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Dinas Pertanian dalam Rencana Kerja Tahun 2021-2024.....	36
3.4.	Perbandingan realisasi Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat, dan Nasional.....	41
3.5.	Pelayanan di Dinas Pertanian.....	43

## **DAFTAR GAMBAR**

1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.....	4
2.1. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa.....	32
2.2. Kegiatan perbenihan.....	33
2.3. Sekolah lapangan OPT dan Iklim.....	33
2.4. Peningkatan kualitas SDG hewan/tumbuhan.....	33
2.5. Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian.....	34
2.6. Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.....	34
2.7. Bantuan asuransi usaha tanaman pangan (AUTP).....	34
3.1. Capaian kinerja Tahun 2023.....	37
3.2. Perbandingan realisasi komoditas unggulan Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	37
3.3. Perbandingan capaian komoditas unggulan Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	38
3.4. Perbandingan realisasi produksi komoditas unggulan Tahun 2023 dengan target Renstra 2024.....	40
3.5. Konsep SIMTANI.....	63

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bentuk wujud pertanggungjawaban dari Dinas dalam memuat rencana kinerja maupun capaian kinerja maka Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada publik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 atas penggunaan anggaran (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan kinerja di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon disusun dengan maksud:

- a. Menyampaikan pertanggungjawaban dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2023;
- b. Mengetahui tingkat capaian atau keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Pertanian selama Tahun 2023;
- c. Bahan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pertanian di Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 bertujuan untuk:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

### 1.1 Struktur Organisasi

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dibentuk berdasarkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

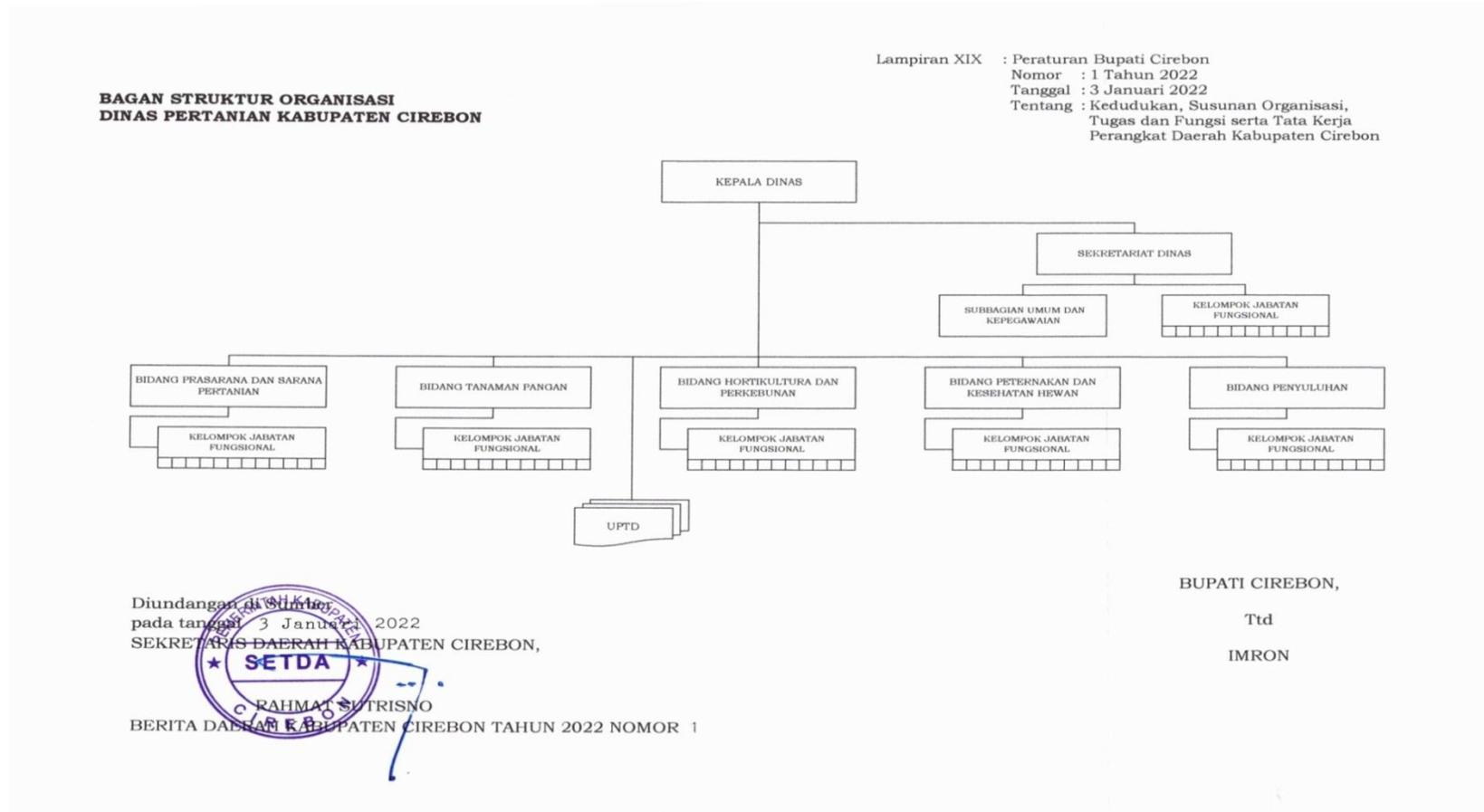
Kontribusi Dinas Pertanian untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Cirebon mengusung misi keempat yaitu “**MAJU**”. Misi keempat dalam dokumen perubahan RPJMD yaitu meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di Pasar Internasional, Nasional, dan Regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah. Misi keempat yang berkaitan dengan sektor pertanian yaitu daam Peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon memiliki bagan struktur organisasi sebagai berikut:

Dalam menjalankan tugasnya Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon memiliki susunan organisasi, yang tercantum dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas, terdiri atas:
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Tanaman Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Hortikultura dan Perkebunan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Penyuluhan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD.

Untuk struktur organisasi Dinas Pertanian sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 dapat digambarkan sebagaimana dalam gambar di bawah ini :



Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

## 1.2 Tugas dan Fungsi

Merujuk pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon menyatakan bahwa Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas ***membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.***

Pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Dinas Pertanian memiliki fungsi, antara lain:

- a. Perumusan kebijakan bidang pertanian;
- b. Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
- c. Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- e. Pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pertanian;
- f. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian, dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu strategis yang di hadapi Dinas Pertanian saat ini adalah rendahnya kesejahteraan petani, hal tersebut akibat beberapa permasalahan seperti berikut ini:

1. Terbatasnya pemanfaatan sarana produksi yang berkualitas;
2. Belum optimalnya ketersediaan prasarana produksi pertanian;
3. Rendahnya adaptasi teknologi di sektor pertanian;
4. Belum optimalnya penerapan pertanian berkelanjutan;
5. Rendahnya fungsi kelembagaan petani;
6. Terbatasnya jaringan pemasaran hasil pertanian;
7. Belum optimalnya upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup;
8. Rendahnya kemampuan permodalan petani.

Dari permasalahan diatas menyebabkan petani kita khususnya di Kabupaten Cirebon memiliki nilai NTP yang kurang. Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayarkan petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Tabel 1.1. Nilai Tukar Petani menurut subsektor Tahun 2022 dan 2023

No	Subsektor	Januari-Desember 2022			Januari-Desember 2023			Perubahan (%)
		It	Ib	NTP	It	Ib	NTP	
1.	Tanaman Pangan	111,41	112,74	98,82	126,27	117,31	107,63	8,92
2.	Tanaman Hortikultura	121,84	112,05	108,74	130,45	116,73	111,75	2,77
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	141,78	112,33	126,22	150,38	117,04	128,49	1,80
4.	Peternakan	113,64	112,25	101,24	118,56	116,45	101,81	0,56
5.	Perikanan	117,12	110,76	105,74	121,66	115,63	105,21	-0,50
	a. Tangkap	117,71	110,58	106,45	122,00	115,75	105,40	-0,99
	b. Budidaya	116,18	111,04	104,63	121,12	115,45	104,92	0,28
	<b>Gabungan</b>	<b>120,67</b>	<b>112,43</b>	<b>107,33</b>	<b>131,59</b>	<b>117,01</b>	<b>112,46</b>	<b>4,78</b>

NTP Nasional Januari – Desember 2023 (Tabel 1.1.) sebesar 112,46 lebih tinggi dari Tahun 2022 hanya 107,33. Perubahan tertinggi terjadi pada Subsektor Tanaman Pangan sebesar 8,92%. Sedangkan dalam

pemantauan harga di 34 Provinsi di Indonesia pada Desember 2023, NTP secara Nasional naik sebesar 0,88% dibandingkan NTP bulan November 2023 yaitu 116,73 menjadi 117,76%.

#### 1.4 Keadaan Pegawai

Dinas Pertanian dalam menjalankan tugasnya didukung oleh ASN dan tenaga honorer. Jumlah masing-masing yaitu PNS 181 orang, PPPK 95 orang, dan tenaga honorer 97 orang (Data per 31 Desember 2023).

Tabel 1.2. Daftar pegawai berdasarkan jenjang kepegawaian Tahun 2023

No	Jabatan	Pegawai yang ada (Orang)		Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi	Laki-Laki	Perempuan
1	Struktural:				
	Eselon I	0			
	Eselon II	1	S3	1	0
	Eselon III	6	S1, S2, S3	4	2
	Eselon IV	11	S1, S2	9	2
2	Pengawas Bibit Ternak	3	S1	2	1
3	Analisis Pasar Hasil Pertanian	3	S1	2	1
4	Pengawas Benih Tanaman	2	S1, S2	2	0
5	Pengawas Mutu Pakan	3	S1, S2	2	1
6	Penyuluh Pertanian	101	SMA, D3, S1, S2	60	41
7	Arsiparis	0	0	0	0
8	Bendahara	0	0	0	0
9	Medik Veteriner	8	S1	2	6
10	Paramedik Veteriner	13	D3	6	7
11	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	1	SMA	1	0
12	Pengadministrasian Umum	6	SMA	6	0
13	Pengawas Lalu Lintas Hewan dan Wilayah Karantina Hewan	1	S1	1	0
14	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	0	0	0	0

15	Pengelola Akuntansi	1	SMA	0	1
16	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	1	D3	0	1
17	Pengelola Keuangan	5	SMA	3	2
18	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	1	SMA	1	0
19	Pengelola Rumah Potong Hewan	1	SMA	1	0
20	Pengelola Teknologi Perbenihan	1	D3	0	1
21	Pengolah Data	1	S1	1	0
22	Verifikator Keuangan	1	SMA	1	0
23	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian	2	S1	2	0
24	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	1	S2	0	1
25	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	1	S2	1	0
26	Perencana Ahli Muda	1	S1	0	1
27	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	1	S1	1	0
28	Analisis Alat dan Mesin Pertanian	1	S1	0	1
29	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	3	S1	1	2
30	Pengawas Pupuk dan Pestisida	1	S1	0	1
		<b>182</b>		<b>110</b>	<b>72</b>

Sedangkan latar belakang pendidikan untuk PNS, PPPK, dan tenaga honorer dari Sekolah Dasar (SD) hingga Strata Tiga (S3) yang tersaji pada tabel-tabel dibawah ini

Tabel 1.3. Distribusi jenjang pendidikan PNS di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S3	2	0	2
2	S2	5	14	19
3	S1	66	30	96
4	D4	1	1	2
5	D3	7	16	23

6	D1/D2	0	0	0
7	SMA/SLTA	24	11	35
8	SMP/SLTP	2	0	2
9	SD	3	0	3
<b>Jumlah</b>		<b>110</b>	<b>72</b>	<b>182</b>

Tabel 1.4. Distribusi jenjang pendidikan PPPK di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S1	36	19	55
2	D3	7	0	7
3	D1/D2	1	0	1
4	SMA/SLTA	29	3	32
<b>Jumlah</b>		<b>73</b>	<b>22</b>	<b>95</b>

Tabel 1.5. Distribusi jenjang pendidikan tenaga honorer di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S1	15	24	39
2	D3	3	2	5
3	SMA/SMK/SLTA	33	3	36
4	SMP	6	1	7
5	SD	8	0	8
<b>Jumlah</b>		<b>65</b>	<b>30</b>	<b>95</b>

Berdasarkan golongan ASN Dinas Pertanian memiliki komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.6. Distrbusi PNS menurut pangkat/golongan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda, IV/c	1	0	1
2	Pembina Tk.I, IV/b	6	2	8
3	Pembina, IV/a	11	6	17
4	Penata Tk.I, III/d	22	7	29
5	Penata, III/c	6	5	11

6	Penata Muda Tk.I, III/b	15	13	28
7	Penata Muda, III/a	14	17	31
8	Pengatur Tk.I, II/d	4	1	5
9	Pengatur, II/c	7	13	20
10	Pengatur Muda Tk.I, II/b	15	3	18
11	Pengatur Muda, II/a	7	4	11
12	Juru Tk.I, I/d	3	0	3
	<b>Jumlah</b>	<b>111</b>	<b>71</b>	<b>182</b>

Tabel 1.7. Distribusi PPPK menurut pangkat/golongan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	IX	36	19	55
2	VII	7	0	7
3	VI	1	0	1
4	V	29	3	32
	<b>Jumlah</b>	<b>73</b>	<b>22</b>	<b>95</b>

### 1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon antara lain:

Tabel 1.8. Sarana dan Prasarana di Dinas Pertanian

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1	Timbangan Gantung Kapasitas 50 Gram.	7
2	Sepeda Motor.	273
3	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ).	8
4	Container.	6
5	Telephone (PABX).	3

6	Alat Pengukur Kadar Air.	2
7	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer).	281
8	Freezer (Alat Laboratorium Pertanian).	5
9	Filing Cabinet Besi.	39
10	Lemari Besi/Metal.	88
11	Brandkas.	2
12	Peti Uang/Cash Box/Coin Box.	1
13	Unit Power Supply.	12
14	Handy Cam.	5
15	Alat Pengukur PH Tanah (Soil Tester).	63
16	LCD Projector/Infocus.	83
17	Global Positioning System.	24
18	Camera Video.	29
19	Lemari Kaca.	29
20	Timbangan Barang.	4
21	Papan Nama Instansi.	25
22	AC Split.	22
23	PC Unit.	36
24	Note Book.	67
25	Printer (Peralatan Personal Komputer).	126
26	Neraca Kapasitas 20 Kg.	3
27	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II.	1
28	Mic Conference.	10
29	Rak Kayu.	10
30	White Board.	3
31	Kursi Rapat.	65
32	Kamera Udara.	5
33	Televisi.	13
34	Loudspeaker.	5
35	Wireless.	6
36	Mic Conference.	4
37	Microphone/Wireless MIC.	45
38	Mesin Absensi.	3
39	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner.	1
40	Kitchen Set.	2
41	Rak Piring Aluminium.	2
42	Water Filter.	1

43	Tangga Aluminium.	1
44	Unit Pengaduk.	5
45	Alat Pengambil Sample Tanah.	5
46	Meja Kerja Pejabat Eselon III.	34
47	Pompa Air.	10
48	Garpu Besi.	28
49	Portable Water Pump.	14
50	Dongkrak Mekanik.	3
51	Alat Prosesing Daging.	6
52	Pemotong Bulu.	7
53	Lap Top.	101
54	Meja 1/2 Biro.	118
55	Kursi Putar.	70
56	Rak Piring Alumunium.	2
57	Meja Komputer.	1
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon II.	8
59	Peralatan Ubinan.	43
60	Alat Pemotong Kertas.	2
61	Meja Periksa Pasien.	3
62	Cool Box/Termos Vaksin	1
63	Alat Pemanas.	4
64	Mesin Pemotong Rumput.	6
65	Kendaraan Roda Tiga (Pengangkut)	4
66	Gerobak Dorong.	22
67	Distortion Analyzer.	1
68	Filing Cabinet Kayu.	14
69	Rak Besi.	1
70	Sofa.	47
71	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV.	14
72	Neraca Dengan Digital Display.	16
73	Portable Generating Set.	20
74	Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya.	21
75	Alat Perontokan Mesin (Power Thresher).	21
76	Processing Multiguna.	29
77	Lemari Kayu.	67
78	CCTV - Camera Control Television System.	1
79	Katrol.	9

80	Stethoscope (Alat Kedokteran Umum).	4
81	Papan Nama Instansi.	32
82	Global Positioning System.	6
83	Kursi Besi/Metal.	33
84	Kursi Kayu.	4
85	Meja Rapat.	127
86	Tempat Tidur Kayu.	2
87	Alat Pengering (Dryer).	4
88	Lemari Obat (Kaca).	4
89	Lemari Es.	2
90	Teko Listrik.	4
91	Panci.	2
92	Televisi.	4
93	Thermos Air.	1
94	Loudspeaker.	1
95	Processing Multiguna.	19
96	Camera Video.	1
97	Mikroskop.	2
98	Mesin Jahit.	1
99	Dispenser.	2
100	Sterilisator.	4
101	Canula Rectal.	10
102	Centrifuge (Alat Kedokteran Umum).	22
103	Penyemprot Mesin (Power Sprayer).	130
104	Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya.	2
105	Tabung Gas.	12
106	Megaphone.	19
107	Camera Digital.	15
108	Operating Lamp.	1
109	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan.	2
110	Internet.	44
111	Scanner (Peralatan Personal Komputer).	4
112	Pick Up.	1
113	Diesel Eggane.	1
114	Senapan Bius	1
115	Modem.	15
116	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum).	1

117	PH Meter Portable.	10
118	Exhaust Fan.	1
119	Router.	1
120	Tractor Four Wheel (Dengan Kelengkapannya).	1
121	CCTV - Camera Control Television System.	2
122	Digital LED Running Text.	7

## 1.6 Keuangan

Dinas Pertanian pada Tahun Anggaran 2023 mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp 50.965.389.942 dengan realisasi sejumlah Rp 45.413.424.948 atau 89,11%. Sedangkan sisa anggaran yang tidak terserap sejumlah Rp 5.551.964.994. Berikut rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 1.9. Keuangan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2023

Kode Rek	Uraian	DPA	LRA
4	PENDAPATAN DAERAH	539.842.200	590.936.350
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	539.842.200	590.936.350
4.1.02	Retribusi Daerah	539.842.200	590.936.350
5.	BELANJA DAERAH	50.965.389.942	45.413.424.948
5.1	BELANJA OPERASI	46.261.096.942	41.816.552.548
5.1.01	Belanja Pegawai	34.036.409.572	31.664.109.550
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.924.687.370	8.052.442.998
5.1.05	Belanja Hibah	3.300.000.000	2.100.000.000
5.2	BELANJA MODAL	4.704.293.000	3.596.872.400
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.771.328.000	1.731.561.600
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.932.965.000	1.865.310.800

Dinas Pertanian hanya mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon saja, tidak mengelola anggaran yang bersumber dari APBN ataupun APBD Provinsi Jawa Barat.

## 1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagai berikut:

## 1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Berisi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis dan sejauh mana Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta langkah-langkah dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

## 2. BAB I. PENDAHULUAN

Berisi ulasan mengenai disusunnya LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Potensi yang menjadi ruang lingkup Dinas Pertanian serta Sistematika Penyajian LKIP.

## 3. BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berisi gambaran singkat mengenai Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2023. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

## 4. BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu juga menyajikan akuntabilitas keuangan yang menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah.

5. BAB IV. PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

6. LAMPIRAN

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 Perencanaan Strategis

RPJMD Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Pertanian yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Pertanian Tahun 2019-2024 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

#### 2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Dinas Pertanian mengacu dari Visi Bupati Cirebon, hal ini dimaksudkan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

**VISI BUPATI CIREBON:**

**Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera,  
Agamis, Maju dan Aman**

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon melaksanakan misi ke empat dari Pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu:

MISI Dinas Pertanian tertuang didalam no 4, yaitu:

*Meningkatkan produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar Internasional, Nasional, dan Regional yang didukung oleh Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah.*

### 2.1.2 Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan perumusan tujuan strategis Dinas Pertanian, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Perumusan sasaran strategis yang mengacu pada tujuan strategis (Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB) dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.1. Sasaran dan indikator kinerja sasaran Dinas Pertanian

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan)	- Jumlah produksi komoditas sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan

Tabel 2.2. Target sasaran di Rencana Strategis Tahun 2020-2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
<b>Renstra 2019-2024</b>								
1	Meningkatnya produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan)	Jumlah produksi komoditas tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan	Ton	468.478	506.686	517,162	548.414	588.778

Adapun strategi dan arah kebijakannya dapat dilihat pada (Tabel 2.3.)

Tabel 2.3. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian

No	Strategi	No	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP)	1.	Mendorong rehabilitasi jaringan irigasi tersier
2	Pengembangan sumber daya genetik hewan dan tanaman komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Cirebon	2.1	Subsidi benih unggul untuk petani di wilayah LP2B
		2.2	Revitalisasi mangga gedong gincu
		2.3	Melakukan pengembangan perbibitan ternak dan optimalisasi inseminasi buatan
3	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk hasil pertanian yang ramah lingkungan	3	Meningkatkan frekuensi penyuluhan mendukung pertanian ramah lingkungan
4	Memperkuat kerjasama dengan balai penelitian serta akademisi	4	Melaksanakan kajian yang berkaitan dengan sektor pertanian
5	Mendorong upaya transfer IPTEK menuju pertanian terpadu dan keberlanjutan	5.1	Membangun sistem pertanian berbasis teknologi informasi
		5.2	Menyiapkan generasi milenial sebagai kader petani milenial
6	Meningkatkan koordinasi pemanfaatan sumber-sumber air lintas kabupaten	6.1	Meningkatkan koordinasi untuk perbaikan/rehabilitasi/sodetan aliran air/pengerukan sungai dan saluran irigasi supaya berfungsi optimal
7	Mendorong penggunaan benih varietas berumur pendek dan tahan terhadap banjir dan kekeringan	7.1	Menyiapkan subsidi premi asuransi usaha tani padi (AUTP) untuk petani di wilayah LP2B
		7.2	Menyiapkan demplot untuk menyediakan benih unggul tahan banjir dan kekeringan
8	Menguatkan koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait dengan sektor pertanian untuk menyusun dan menerbitkan regulasi pendukung dalam sistem pemasaran hasil pertanian dan mendukung ketahanan pangan	8	Menyiapkan peraturan daerah dan kepala daerah untuk mendorong pengembangan sektor pertanian
9	Meningkatkan pengawasan peredaran hewan/tanaman dan bahan asal hewan/tanaman	9	Meningkatkan penerapan praktik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan secara baik (Good Agriculture Practices, Good Handling Practices, dan Good Manufacturing Practices)

Sementara kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon diukur dari pencapaian target misi Bupati yang tertuang dalam perencanaan yang terukur. Target misi Bupati tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) serta rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berikut capaian atas target kinerja tahun 2022 dan 2023.

### 2.1.3 Strategi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Pertanian melaksanakan 2 urusan Pemerintahan yaitu : (1) Urusan Pertanian yang memiliki 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 20 (dua puluh) sub kegiatan; dan (2) Non urusan Pertanian memiliki 1 (satu) program, 6 (enam) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan.

Tabel 2.4. Strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1.	Meningkatnya produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan)	<b>1. Urusan Pertanian</b>		Ø Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	
			<b>Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian</b>	Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Ø Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian
				Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten/Kota	Ø Pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil

	Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah Kabupaten/Kota	Ø Penjaminan peredaran benih/bibit ternak
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan Kabupaten/Kota	Ø Pemanfaatan SDG hewan/tanaman
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan Kabupaten/Kota	Ø Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman
<b>Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian</b>	Kegiatan pembangunan prasarana pertanian	Ø Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani
		Ø Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani
		Ø Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana lainnya
		Ø Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Ø Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2 B, kawasan pertanian pangan

		berkelanjutan/KP2 B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP 2B
<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota	Ø Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota	Ø Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/Kota	Ø Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis
	Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah Kabupaten/Kota	Ø Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner
	Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Ø Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan
<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>	Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota	Ø Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian

			Ø Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa
			Ø Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa
			Ø Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian
<b>2. Non Urusan Pertanian</b>			
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Ø Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
			Ø Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
			Ø Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
			Ø Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
			Ø Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
			Ø Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan

		ikhtisar realisasi kinerja SKPD
		Ø Evaluasi kinerja perangkat daerah
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Ø Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
		Ø Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
		Ø Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/s emesteran SKPD
	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Ø Pengamanan barang milik daerah SKPD
	Administrasi umum perangkat daerah	Ø Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		Ø Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
		Ø Penyediaan bahan logistik kantor
		Ø Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		Ø Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		Ø Penyediaan bahan/material

		Ø Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Ø Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Ø Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
		Ø Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan
		Ø Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
		Ø Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan

wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja serta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

Tabel 2.5. Perjanjian kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan
1.	Meningkatkan produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan)	Jumlah produksi komoditas sektor tanaman pangan, perkebunan, horikultura dan peternakan	ton	487.605

Pada bulan Oktober 2023, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon melaksanakan perubahan perjanjian kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan dokumen pelaksanaan perubahan perjanjian kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6. Perubahan perjanjian kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan
1.	Meningkatkan produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan)	Jumlah produksi komoditas sektor tanaman pangan, perkebunan, horikultura dan peternakan	ton	487.605

Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume dan anggaran bertambah dari semula Rp 40.518.592.542 menjadi Rp 50.965.389.942.

### 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon melaksanakan kegiatan dengan anggaran perubahan sebesar Rp 50.965.389.942 dengan realisasi sebesar Rp 45.413.424.948 atau 89,11%. Sedangkan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 5.551.964.994.

#### 2.3.1. Target belanja Dinas Pertanian

Ada dua jenis belanja yang ada di Dinas Pertanian yaitu (1) belanja operasi dan (2) belanja modal. Belanja operasi Dinas Pertanian memiliki pagu keuangan sebesar Rp 46.261.096.942,- sedangkan pada belanja modal sebesar Rp 4.704.293.000,-

Tabel 2.7. Target belanja Dinas Pertanian dari APBD perubahan Tahun 2023

Uraian	Target	Persentase (%)
Belanja Operasi	46.261.096.942	90,39
Belanja Modal	4.704.293.000	76,46
Jumlah	50.965.389.942	89,11

#### 2.3.2 Alokasi anggaran per sasaran strategis

Anggaran Dinas Pertanian untuk mendukung 2 urusan kegiatan, yaitu (1) Urusan Pertanian yang memiliki 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 20 (dua puluh) sub kegiatan; dan (2) Non urusan Pertanian memiliki 1 (satu) program, 6 (enam) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan.

Adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan ada pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8. Anggaran belanja di Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2023

No	Program	Pagu	Realisasi	Persentase (%)	Efisiensi
<b>1. Urusan Pertanian</b>					
<b>A. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian</b>					
1.	Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	<b>439.014.100</b>	<b>430.370.180</b>	<b>98,03</b>	
	Ø Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	255.490.100	248.267.860	97,17	Efisiensi
	Ø Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	183.524.000	182.102.320	99,23	Efisiensi
2.	Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten/Kota	<b>430.666.500</b>	<b>377.971.100</b>	<b>87,76</b>	
	Ø Pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	430.666.500	377.971.100	87,76	Efisiensi
3.	Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah Kabupaten/Kota	<b>128.136.500</b>	<b>93.946.230</b>	<b>73,32</b>	
	Ø Penjaminan peredaran benih/bibit ternak	128.136.500	93.946.230	73,32	Efisiensi
4.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan Kabupaten/Kota	<b>563.567.800</b>	<b>519.368.160</b>	<b>92,16</b>	
	Ø Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	300.000.000	264.712.000	88,24	Efisiensi
	Ø Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	263.567.800	254.656.160	96,62	Efisiensi
<b>B. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian</b>					
1.	Kegiatan pembangunan prasarana pertanian	<b>4.001.960.700</b>	<b>2.536.653.805</b>	<b>63,39</b>	

	Ø Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	2.109.302.700	876.102.700	41,54	Tidak efisiensi
	Ø Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	1.284.014.900	1.281.709.340	99,82	Efisiensi
	Ø Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	188.500.000	187.886.080	99,67	Efisiensi
	Ø Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan	420.143.100	190.955.685	45,45	Tidak efisiensi
3.	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>497.969.500</b>	<b>497.865.500</b>	<b>99,98</b>	
	Ø Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B	497.969.500	497.865.500	99,98	Efisiensi
	<b>C. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>				
1.	<b>Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>158.062.100</b>	<b>157.950.980</b>	<b>99,93</b>	
	Ø Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	75.423.500	75.423.500	100	Efisiensi
	Ø Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	82.638.600	82.527.480	99,87	Efisiensi
	<b>D. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>				
1.	<b>Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>241.869.200</b>	<b>208.068.610</b>	<b>86,03</b>	
	Ø Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	241.869.200	208.068.610	86,03	Efisiensi
2.	<b>Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>451.628.400</b>	<b>345.313.630</b>	<b>76,46</b>	
	Ø Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner	451.628.400	345.313.630	76,46	Efisiensi

3.	Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	102.469.400	102.215.770	99,75	
	Ø Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	102.469.400	102.215.770	99,75	Efisiensi
<b>E. Program Perizinan Usaha Pertanian</b>					
1.	Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota	82.765.200	82.598.520	99,80	
	Ø Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian	82.765.200	82.598.520	99,80	Efisiensi
<b>F. Program Penyuluhan Pertanian</b>					
1.	Pelaksanaan penyuluhan pertanian	6.748.012.000	5.397.236.150	79,98	
	Ø Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa	1.643.149.100	1.406.412.400	85,59	Efisiensi
	Ø Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa	194.011.700	186.332.950	96,04	Efisiensi
	Ø Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	4.910.851.200	3.804.490.800	77,47	Efisiensi
<b>2. Urusan Non Pertanian</b>					
<b>A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	280.245.900	249.749.276	89,12	
	Ø Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	231.253.700	200.806.156	86,83	Efisiensi
	Ø Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	3.138.000	3.138.000	100	Efisiensi
	Ø Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2.730.000	2.730.000	100	Efisiensi
	Ø Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	1.050.000	1.050.000	100	Efisiensi

	Ø Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	1.500.000	1.500.000	100	Efisiensi
	Ø Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.200.100	4.200.100	100	Efisiensi
	Ø Evaluasi kinerja perangkat daerah	36.374.100	36.325.020	99,87	Efisiensi
2.	Administrasi keuangan perangkat daerah	<b>34.065.405.572</b>	<b>31.692.905.990</b>	<b>93,04</b>	
	Ø Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	34.036.409.572	31.664.109.550	93,03	Efisiensi
	Ø Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3.799.800	3.655.800	96,21	Efisiensi
	Ø Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	25.196.200	25.140.640	99,78	Efisiensi
3.	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	<b>165.512.700</b>	<b>157.649.140</b>	<b>95,25</b>	
	Ø Pengamanan barang milik daerah SKPD	165.512.700	157.649.140	95,25	Efisiensi
4.	Administrasi umum perangkat daerah	<b>402.397.300</b>	<b>395.069.600</b>	<b>98,18</b>	
	Ø Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.897.400	3.897.400	100	Efisiensi
	Ø Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	71.632.000	70.577.000	98,53	Efisiensi
	Ø Penyediaan bahan logistik kantor	84.108.000	84.052.440	99,93	Efisiensi
	Ø Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	42.599.900	41.124.900	96,54	Efisiensi
	Ø Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	21.570.000	17.846.000	82,74	Efisiensi
	Ø Penyediaan bahan/material	94.974.900	94.018.800	98,99	Efisiensi
	Ø Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	83.615.100	83.553.060	99,93	Efisiensi
5.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	<b>325.607.706</b>	<b>317.072.147</b>	<b>97,38</b>	
	Ø Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	325.607.706	317.072.147	97,38	Efisiensi
6.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	<b>1.880.099.364</b>	<b>1.851.420.160</b>	<b>98,47</b>	
	Ø Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	786.133.500	781.540.280	99,42	Efisiensi
	Ø Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan	47.135.500	26.609.100	56,45	Efisiensi

perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan				
Ø Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	15.600.000	15.600.000	100	Efisiensi
Ø Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1.031.230.364	1.027.670.780	99,65	Efisiensi

Pada (Tabel 2.8.) kegiatan yang ada di Dinas Pertanian hampir semuanya telah mencapai efisiensi, anggaran yang tidak mencapai nominal Pagu yang telah di tetapkan karena harga di pasar lebih rendah dari pada Pagu yang dicantumkan. Sedangkan sub kegiatan yang tidak mencapai efisiensi, yaitu : (1) pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani tidak tercapai targetnya karena ada kegiatan DAK yang tidak dilaksanakan sehingga belanja jasa tenaga ahli tidak terserap. Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena tidak sesuai dengan hukum tata ruang; (2) pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan tidak mencapai target anggaran karena tidak cukupnya waktu untuk pelaksanaan belanja anggaran tambahan pembangunan jembatan.

**2.4. Instrumen Pendukung**



Gambar 2.1. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa



Gambar 2.2. Kegiatan perbenihan



Gambar 2.3. Sekolah lapangan OPT dan Iklim



Gambar 2.4. Peningkatan kualitas SDG hewan/tumbuhan



Gambar 2.5. Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian



Gambar 2.6. Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan



Gambar 2.7. Bantuan asuransi usaha tanaman pangan (AUTP)

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan dalam pengukuran capaian kinerja adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran di Dinas Pertanian.

Tabel 3.1. Skala nilai peringkat kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon telah membuat perjanjian kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahun 2023 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Pertanian Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.2. Target sasaran dan indikator kinerja Dinas Pertanian dalam Rencana Strategis Tahun 2021 - 2024

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target			
				2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan)	Jumlah produksi komoditas tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan	Ton	506.686	517.162	548.414	588.788

Dokumen rencana strategis disusun untuk tahun 2019-2024 namun dalam pelaksanaannya ada peraturan terbaru yang mengatur mengenai nomenklatur program dan kegiatan yaitu Permendagri nomor 90 Tahun 2019 maka dilakukan perubahan Renstra 2019-2024. Pada saat penyusunan perubahan Renstra asumsi yang digunakan adalah asumsi optimis dimana semua kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses produksi tercukupi sehingga target produksi seperti tertuang pada Tabel 3.2. namun apabila sarana dan prasarana produksi sesuai dengan kondisi yang ada maka target produksi pada rencana kerja (Renja) setiap tahunnya disesuaikan dengan potensi yang ada seperti pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Target sasaran dan indikator kinerja Dinas Pertanian dalam Rencana Kerja Tahun 2021-2024

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
				2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan)	Jumlah produksi komoditas tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan	Ton	480.388	483.953	487.605	491.229

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun rinciannya sebagai berikut:



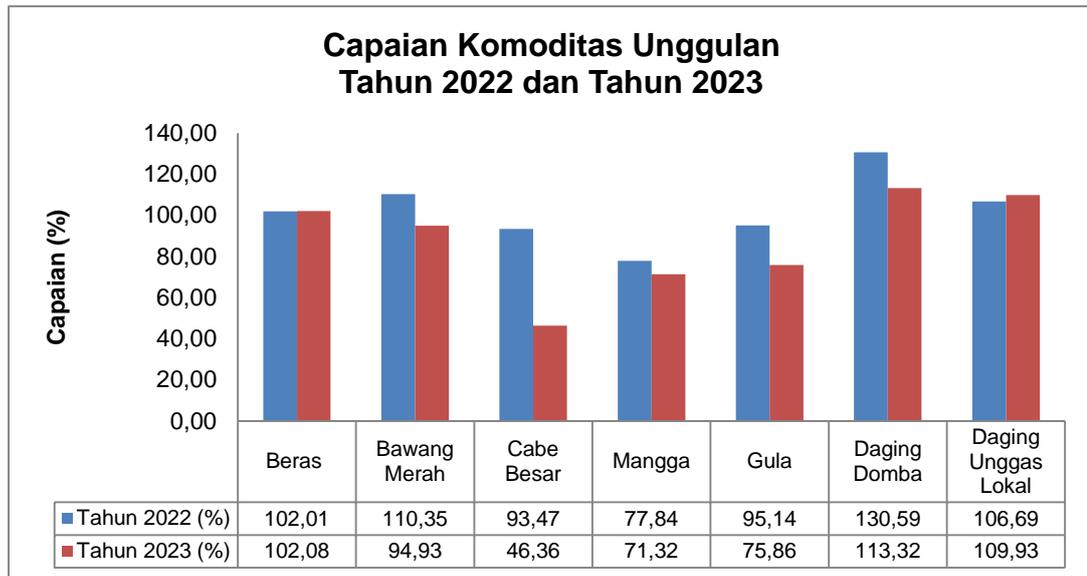
Gambar 3.1. Capaian kinerja Tahun 2023

Pencapaian target sasaran Dinas Pertanian untuk Tahun 2023 sebesar 548.414 ton, dan realisasinya sebesar 468.974,92 ton atau tercapai 85,51%. Sehingga capaian kinerja ini dikatakan tercapai, dan memiliki kinerja penilaian kinerja capaian sasaran strategis yang **“Tinggi”**.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis



Gambar 3.2. Perbandingan realisasi komoditas unggulan Tahun 2022 dan Tahun 2023



Gambar 3.3. Perbandingan capaian komoditas unggulan Tahun 2022 dan Tahun 2023

Hasil data Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa:

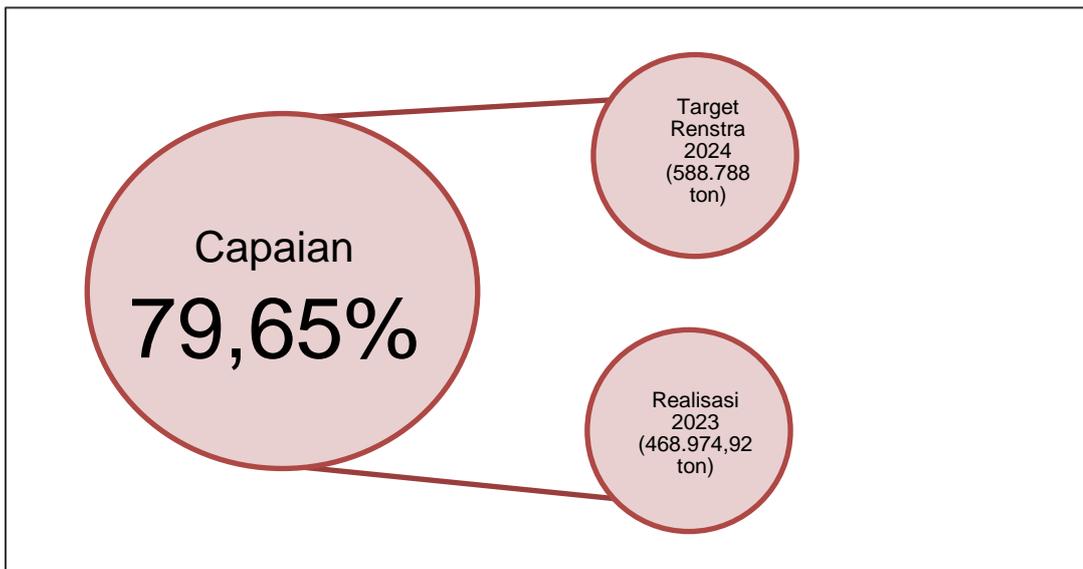
1. Pada sektor tanaman pangan (beras) menunjukkan kenaikan di Tahun 2023 dari tahun 2022. Pada tahun 2022 hanya memproduksi sebesar 367.205 ton atau capaiannya sebesar 102,01% dari target. Sedangkan produksi di Tahun 2023 sebesar (370.611 ton) atau capaiannya sebesar 102,08% dari target. Hal ini **disebabkan** karena (1) ada peningkatan Index Pertanaman (IP) dari program GERNAS, (2) Bantuan pompanisasi, (3) luas tanam bertambah menjadikan luas panen bertambah, (4) peningkatan penerepan teknologi, (5) pemupukan cukup.
2. Sektor tanaman hortikultura memiliki hasil produksi sebagai berikut:
  - Pada komoditas bawang merah memiliki produksi 34.523 ton atau capaiannya sebesar (94,93%) dari target Tahun 2023 lebih kecil dari hasil produksi di Tahun 2022 (39.969 ton) atau capaiannya sebesar 110,35%. Hal ini **disebabkan** oleh: (1) luas tanam menurun sehingga mempengaruhi ke luas panen dan produksi, (2)

- Alih komoditas, (3) tidak ada air/kekeringan karena kemarau (*el-nino*).
- Pada cabai besar menunjukkan hasil produksi di Tahun 2022 sebesar 5.851,4 ton atau capaiannya sebesar 93,47% dari target sedangkan di Tahun 2023 hanya 2.913,9 ton atau sebesar 46,36% dari target. Produksi ini terjadi penurunan, hal ini **disebabkan** karena (1) luas tanam berkurang, sehingga luas panen berkurang menjadikan produksi menjadi turun, (2) musim panas ekstrim (*el-nino*) berdampak sulit air.
  - Pada komoditas mangga terjadi penurunan yang cukup tinggi dari hasil produksi Tahun 2022 sejumlah 43.935 ton atau sebesar 77,84% dari target, menjadi 40.456 ton di Tahun 2023 atau capaiannya sebesar 71,32%. Produksi ini menurun **dipengaruhi** oleh : (1) cuaca yang terlalu panas membuat bunga/bakal buah banyak yang terbakar/mengering, (2) banyak bunga/bakal buah yang gagal berkembang menjadi buah gagal, (3) jumlah tanaman menghasil berkurang.
3. Sektor tanaman perkebunan menunjukkan hasil produksi gula di Tahun 2022 (20.555,84 ton) atau tercapai 95,14% menjadi (16.421,12 ton) atau tercapai 75,86%. Penurunan ini **disebabkan** (1) kebakaran lahan, (2) cuaca ekstrem, (3) keterlambatan tebangan, (4) mahalannya sarana produksi pertanian, (5) kekurangan tenaga tebangan pada musim tebang, (6) alih komoditas, (7) alih fungsi lahan.
4. Pada sektor peternakan memiliki nilai produksi sebagai berikut:
- Produksi daging unggas lokal sebesar 1.934,32 ton atau tercapai 106,69 dari target (Tahun 2022) meningkat menjadi 2.022,76 ton atau tercapai 109,93% (Tahun 2023). **Penyebab** peningkatan

unggulan lokal di Tahun 2023 karena adanya peningkatan konsumsi dari masyarakat, dan adanya peningkatan populasi ternak.

- Pada daging domba mengalami penurunan dari 2.153,35 ton atau tercapai 130,59% (Tahun 2022) menjadi 1.898,14 ton atau tercapai 113,32% di Tahun 2023. Hal ini **disebabkan** (1) adanya peningkatan harga sehingga daya beli masyarakat menurun. (2) peternak masih banyak yang takut beternak domba karena penyakit PMK yang meningkat di Tahun 2022, (3) daya beli masyarakat saat kurban di Tahun 2023 menurun.

Pencapaian Produksi di sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan) sampai Tahun 2023 sudah mencapai 79,65% dari target Renstra Tahun 2024 dengan kriteria **Tinggi**.



Gambar 3.4.. Perbandingan realisasi produksi komoditas unggulan Tahun 2023 dengan target Renstra 2024

Tabel 3.4. Perbandingan realisasi Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat dan Nasional

No	Komoditas	Kabupaten Cirebon (ton)	Jawa Barat * (ton)	Nasional * (ton)
1	Beras	370.611	5.447.806,31	31.540.521,77
2	Bawang Merah	34.523	193.318	1.982.360
3	Cabe Besar	2.913,9	357.695	1.475.821
4	Mangga	40.456	451.174	3.308.895
5	Gula	16.421,12	72.000	2.400.000
6	Daging Domba	1.898,14	35.269,62	54.650,53
7	Daging Unggas Lokal	2.022,76	733.981,72	3.765.573,09

Ket : (\*) angka sementara  
 Sumber : BPS, 2023

Komoditas unggulan di Kabupaten Cirebon ada 7 (tujuh) yaitu :

- a. Komoditas Beras, Kabupaten Cirebon memiliki data produksi di Tahun 2023 sebesar 370.611 ton. Dari Produksi Propinsi Jawa Barat (5.447.806,31 ton), dan produksi Nasional sebesar (31.540.521,77 ton). Capaian produksi beras Kabupaten Cirebon di Propinsi Jawa Barat sebesar 6,8%, sedangkan capaian Kabupaten Cirebon terhadap Nasional hanya sebesar 1,18%.
- b. Komoditas Bawang merah memiliki hasil produksi sebesar 34.523 ton di Tahun 2023, dari hasil produksi di Jawa Barat yang mencapai 193.318 ton, dan produksi Nasional mencapai 1.982.360 ton. Capaian bawang merah Kabupaten Cirebon di Propinsi Jawa Barat sebesar 17,86%, sedangkan capaian Kabupaten Cirebon terhadap Nasional sebesar 1,74%.
- c. Komoditas Cabe Besar, memiliki hasil produksi 2.913,9 ton dari produksi Jawa Barat yang mencapai 357.695 ton, dan produksi Nasional mencapai 1.475.821 ton. Capaian produksi cabe besar di Kabupaten Cirebon terhadap Propinsi Jawa Barat hanya 0,81%, sedangkan capaian produksi terhadap Nasional sebesar 0,2%.

- d. Komoditas Mangga di Kabupaten Cirebon memiliki hasil produksi sebesar 40.456 ton, sedangkan di Propinsi Jawa Barat produksinya mencapai 451.174 ton, dan produksi Nasional mencapai 3.308.895 ton. Capaian produksi mangga Kabupaten Cirebon di Propinsi Jawa Barat sebesar 8,97%, sedangkan capaian Kabupaten Cirebon terhadap Nasional hanya sebesar 1,22%.
- e. Komoditas Gula untuk Kabupaten Cirebon memiliki produksi 16.421,12 ton di Tahun 2023, sedangkan di Propinsi Jawa Barat memiliki produksi sebesar 72.000 ton, dan produksi Nasional mencapai 2.400.000 ton. Capaian produksi gula di Kabupaten Cirebon terhadap Propinsi Jawa Barat hanya 22,81%, sedangkan capaian produksi terhadap Nasional sebesar 0,68%.
- f. Komoditas Daging Domba produksinya mencapai 1.898,14 ton, di Propinsi Jawa Barat produksi mencapai 35.269,62 ton, dan produksi Nasional mencapai 54.650,53 ton. Capaian produksi daging domba Kabupaten Cirebon di Propinsi Jawa Barat sebesar 5,38%, sedangkan capaian daging domba Kabupaten Cirebon terhadap Nasional hanya sebesar 3,47%.
- g. Komoditas Daging Unggas Lokal Kabupaten Cirebon di Tahun 2023 produksinya mencapai 2.022,76 ton, produksi di Propinsi Jawa Barat mencapai 733.981,72 ton, dan produksi Nasional mencapai 3.765.573,09 ton. Capaian daging unggas lokal Kabupaten Cirebon di Propinsi Jawa Barat sebesar 0,28%, sedangkan capaian Kabupaten Cirebon terhadap Nasional sebesar 0,05%.

### 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Dinas pertanian memiliki beberapa pelayanan, dari survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang telah dilakukan oleh Dinas pertanian memiliki nilai IKM 84,178 masuk dalam katagori B (memuaskan)

Tabel 3.5. Pelayanan di Dinas Pertanian

No	Jenis Pelayanan	Sampel	IKM	IKM Konversi	Mutu Layanan
1	Pelayanan Penyuluh Pertanian				
2	Pelayanan Bantuan Hibah				
3	Pelayanan Penyewaan Kios Pupuk				
4	Pelayanan Data Pertanian	100	3,367	84,178	B
5	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak				
6	Pelayanan Pemberian Izin Usaha				

### 3.4 Realisasi Anggaran

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugasnya ada 2 urusan, yaitu:

**A. Urusan Pertanian**, dengan 6 program, 12 kegiatan, dan 20 sub kegiatan:

#### 1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

##### a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar Rp. 439.014.100,- dan terealisasi sebesar Rp.430.370.180,- sisa sebesar Rp. 8.643.920,- atau tercapai sebesar 98,03%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, adapun sub kegiatannya yaitu:

a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 255.490.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 248.267.860,- atau tercapai sebesar 97,17%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut:

Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi, target (12 laporan) capaian (12 laporan).

- b. Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 183.524.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 182.102.320,- atau tercapai sebesar 99,23%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, target (1 laporan) capaian (1 laporan).

**b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Alokasi anggaran untuk Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebesar Rp. 3.581.817.600,- dan terealisasi sebesar Rp.2.345.698.120,- sisa sebesar Rp. 1.236.119.480,- atau tercapai sebesar 65,49%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

Pembangunan Prasarana Pertanian, adapun sub kegiatannya yaitu:

- a. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.109.302.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 876.102.700,- atau tercapai sebesar 41,54%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara, target (10 unit) capaian (4 unit)

- b. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.284.014.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.281.709.340,- atau tercapai sebesar 99,82%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut:

Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara, target (6 unit) capaian (6 unit).

- c. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 188.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 187.886.080,- atau tercapai sebesar 99,67%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara, target (1 unit) capaian (1 unit)

## 2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

### a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar Rp.558.803.000,- dan terealisasi sebesar

Rp.471.917.330,- sisa sebesar Rp. 86.885.670,- atau tercapai sebesar 84,45%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten/Kota, adapun sub kegiatannya yaitu:

Pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 430.666.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 377.971.100,- atau tercapai sebesar 87,76%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil, target (12 laporan) capaian (12 laporan).

b. Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah Kabupaten/Kota, adapun sub kegiatannya yaitu:

Penjaminan peredaran benih/bibit ternak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 128.136.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 93.946.230,- atau tercapai sebesar 73,32%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar, target (400 ekor) capaian (536 ekor).

**b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Alokasi anggaran untuk Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebesar Rp. 420.143.100,- dan terealisasi sebesar Rp.190.955.685,- sisa sebesar Rp. 229.187.415,- atau tercapai sebesar 45,45%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan prasarana pertanian, adapun sub kegiatannya yaitu:

Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 420.143.100,- dan terealisasi sebesar Rp.190.955.685,- sisa sebesar Rp. 229.187.415,- atau tercapai sebesar 45,45%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara, target (1 unit) capaian (1 unit)

**c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Alokasi anggaran untuk Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebesar Rp. 795.967.000,- dan terealisasi sebesar Rp.655.598.010,- sisa sebesar Rp. 140.368.990,- atau tercapai sebesar 82,36%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/Kota, adapun sub kegiatannya yaitu: Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 241.869.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 208.068.610,- atau tercapai sebesar 86,03%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, target (12 laporan), capaian (1 laporan).

- b. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah Kabupaten/Kota, adapun sub kegiatannya yaitu: Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 451.628.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 345.313.630,- atau tercapai sebesar 76,46%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator : Jumlah pelayanan jasa medik veteriner, target (12 laporan) capaian (12 laporan).

- c. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, adapun sub kegiatannya yaitu: Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 102.469.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 102.215.770,- atau tercapai sebesar 99,75%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator :  
Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk  
Hewan, target (12 laporan) capaian (12 laporan).

### 3) Bidang Tanaman Pangan

#### a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar Rp. 300.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.264.712.000,- sisa sebesar Rp. 35.288.000,- atau tercapai sebesar 88,24%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan: Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan Kabupaten/Kota, adapun sub kegiatannya yaitu: Pemanfaatan SDG hewan/tanaman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.264.712.000,- sisa sebesar Rp. 35.288.000,- atau tercapai sebesar 88,24%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman, target (1 dokumen) capaian (1 dokumen).

#### b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebesar

Rp. 497.969.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 497.865.500,- atau tercapai sebesar 99,98 %.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan prasarana pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 497.969.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 497.865.500,- atau tercapai sebesar 99,98 %. Adapun sub kegiatannya yaitu:

Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola, target (1 dokumen) capaian (1 dokumen).

**c) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Alokasi anggaran untuk Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sebesar Rp. 75.423.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 75.423.500,- atau tercapai sebesar 100 %.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.423.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 75.423.500,- atau tercapai sebesar 100 % adapun sub kegiatannya yaitu: Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan, target (1.936 Ha) capaian (7.695 Ha).

#### **4) Bidang Hortikultura dan Perkebunan**

##### **a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Alokasi anggaran untuk Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar Rp. 263.567.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 254.656.160,- sisa sebesar Rp. 8.911.640,- atau tercapai sebesar 96,62%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan: Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan Kabupaten/Kota, adapun sub kegiatannya yaitu: Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 263.567.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 254.656.160,- sisa sebesar Rp. 8.911.640,- atau tercapai sebesar 96,62%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman, target (1 dokumen) capaian (1 dokumen).

**b) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Alokasi anggaran untuk Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sebesar Rp. 82.638.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 82.527.480,- atau tercapai sebesar 99,87 %.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.638.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 82.527.480,- atau tercapai sebesar 99,87 %. Adapun sub kegiatannya yaitu: Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator : Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani, target (1.481 Ha) capaian (1.481 Ha).

**c) Program Perizinan Usaha Pertanian**

Alokasi anggaran untuk Program Perizinan Usaha Pertanian sebesar Rp. 82.765.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 82.598.520,- atau tercapai sebesar 99,80 %.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan: Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.765.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 82.598.520,- atau tercapai sebesar 99,80 %, adapun sub kegiatannya yaitu: Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator : Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian, target (1 laporan) capaian (1 laporan).

## 5) Bidang Penyuluhan Pertanian

### a) Program Penyuluhan Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Penyuluhan Pertanian sebesar Rp. 6.748.012.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.397.236.150,- sisa sebesar Rp. 1.350.775.850,- atau tercapai sebesar 79,98%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

Pelaksanaan penyuluhan pertanian, adapun sub kegiatannya yaitu:

- Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.643.149.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.406.412.400,- atau tercapai sebesar 85,59%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya, target (16 unit) capaian (16 unit).

- Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 194.011.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 186.332.950,- atau tercapai sebesar 96,04%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya, target (300 unit) capaian (300 unit).

Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.910.851.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.804.490.800,- atau tercapai sebesar 77,47%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, target (16 unit) capaian (16 unit).

**B. Urusan Non Pertanian**, dengan 1 program, 6 kegiatan, dan 23 sub kegiatan

**1) Sekretariat Dinas Pertanian**

**a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Alokasi anggaran untuk Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 37.119.268,542,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.663.866.313,- sisa sebesar Rp. 2.455.402.229,- atau tercapai sebesar 93,39%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, adapun sub kegiatannya yaitu:
  - o Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 231.253.700,- dan terealisasi sebesar

Rp. 200.806.156,- atau tercapai sebesar 86,83%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut:

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, target (4 dokumen) capaian (4 dokumen).

- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.138.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.138.000,- atau tercapai sebesar 100%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, target 1 dokumen capaian 1 dokumen.

- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.730.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.730.000,- atau tercapai sebesar 100%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, target 2 dokumen capaian 2 dokumen.

- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 1.050.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.050.000,- atau tercapai sebesar 100%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, target 1 dokumen capaian 1 dokumen.

- Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.500.000,- atau tercapai sebesar 100%. Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, target 2 dokumen capaian 2 dokumen.
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.200.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.200.100,- atau tercapai sebesar 100%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, target 3 laporan capaian 3 laporan.

- Evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.374.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.325.020,- atau tercapai sebesar 99,87%.  
Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target 12 laporan capaian 12 laporan.
- b. Administrasi keuangan perangkat daerah, adapun sub kegiatannya yaitu:
  - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.036.409.572,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.664.109.550,- atau tercapai sebesar 93,04%.  
Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, target 295 orang capaian 291 orang.
  - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.799.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.655.800,- atau tercapai sebesar 96,21%.  
Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun SKPD, target 1 laporan capaian 1 laporan.

- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.196.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.140.640,- atau tercapai sebesar 99,78%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, target 3 laporan capaian 3 laporan.

- c. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, adapun sub kegiatannya yaitu:

Pengamanan barang milik daerah SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 165.512.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 157.649.140,- atau tercapai sebesar 95,25%.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, target 12 dokumen capaian 12 dokumen

- d. Administrasi umum perangkat daerah, adapun sub kegiatannya yaitu:

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 3.897.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.897.400,- atau tercapai sebesar 100%. Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan target 5 paket, capaian 5 paket.

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.632.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 70.577.000,- atau tercapai sebesar 98,53%. Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, target 8 paket capaian 8 paket.
- Penyediaan bahan logistik kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.108.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 84.052.440,- atau tercapai sebesar 99,93%. Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, target 11 paket capaian 11 paket.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.599.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 41.124.900,- atau tercapai sebesar 95,54%. Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut: Jumlah Paket Barang Cetak

dan Penggandaan yang Disediakan, target 10 paket capaian 10 paket.

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.570.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.846.000,- atau tercapai sebesar 98,84%. Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, target 4 dokumen capaian 4 dokumen.
- Penyediaan bahan/material, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94.974.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 94.018.800,- atau tercapai sebesar 98,99%. Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, target 31 paket capaian 31 paket.
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 83.615.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 83.553.060,- atau tercapai sebesar 99,93%. Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, target 12 laporan capaian 12 laporan.

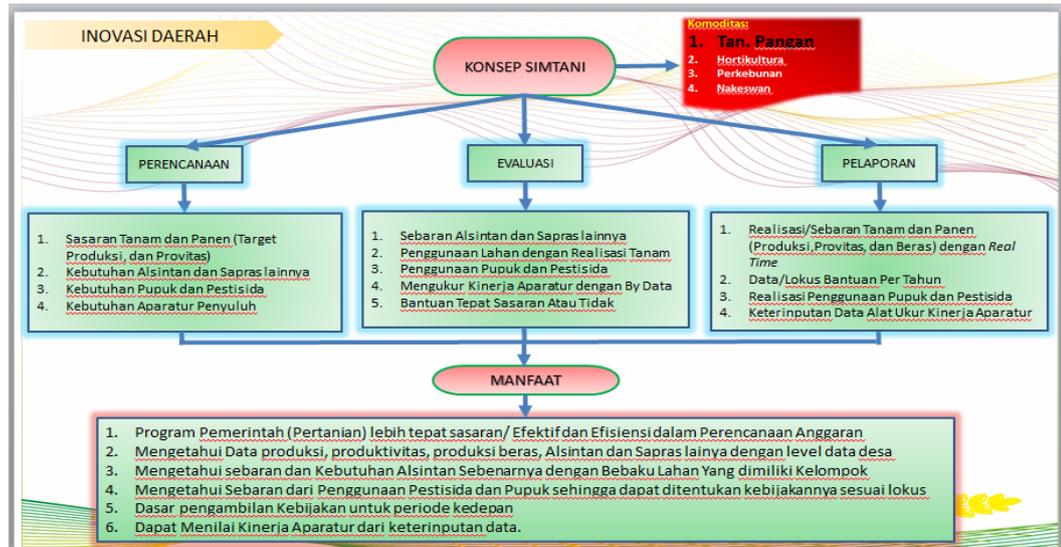
- e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, adapun sub kegiatannya yaitu:
- o Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 325.607.706,- dan terealisasi sebesar Rp. 317.072.147,- atau tercapai sebesar 97,38%. Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, target 12 laporan capaian 12 laporan.
- f. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, adapun sub kegiatannya yaitu:
- o Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 786.133.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 781.540.280,- atau tercapai sebesar 99,42%.  
Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, target 248 unit capaian 248 unit.
  - o Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 47.135.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.60.100,- atau tercapai sebesar 56,45%. Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, target 248 unit capaian 248 unit.

- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.600.000,- atau tercapai sebesar 100%. Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, target 7 unit capaian 7 unit.
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.031.230.364,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.027.670.780,- atau tercapai sebesar 99,65%. Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui indikator sebagai berikut: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, target 23 unit capaian 23 unit.

### 3.5. Inovasi

Dinas Pertanian memiliki inovasi yaitu sebuah sistem yang diberi nama SIMTANI (Sistem Informasi Manajemen Pertanian). SIMTANI sebagai sarana pengelolaan data pertanian dirancang dalam bentuk *web app* yang terintegrasi dengan teknologi geospasial.



Gambar 3.5. Konsep SIMTANI

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

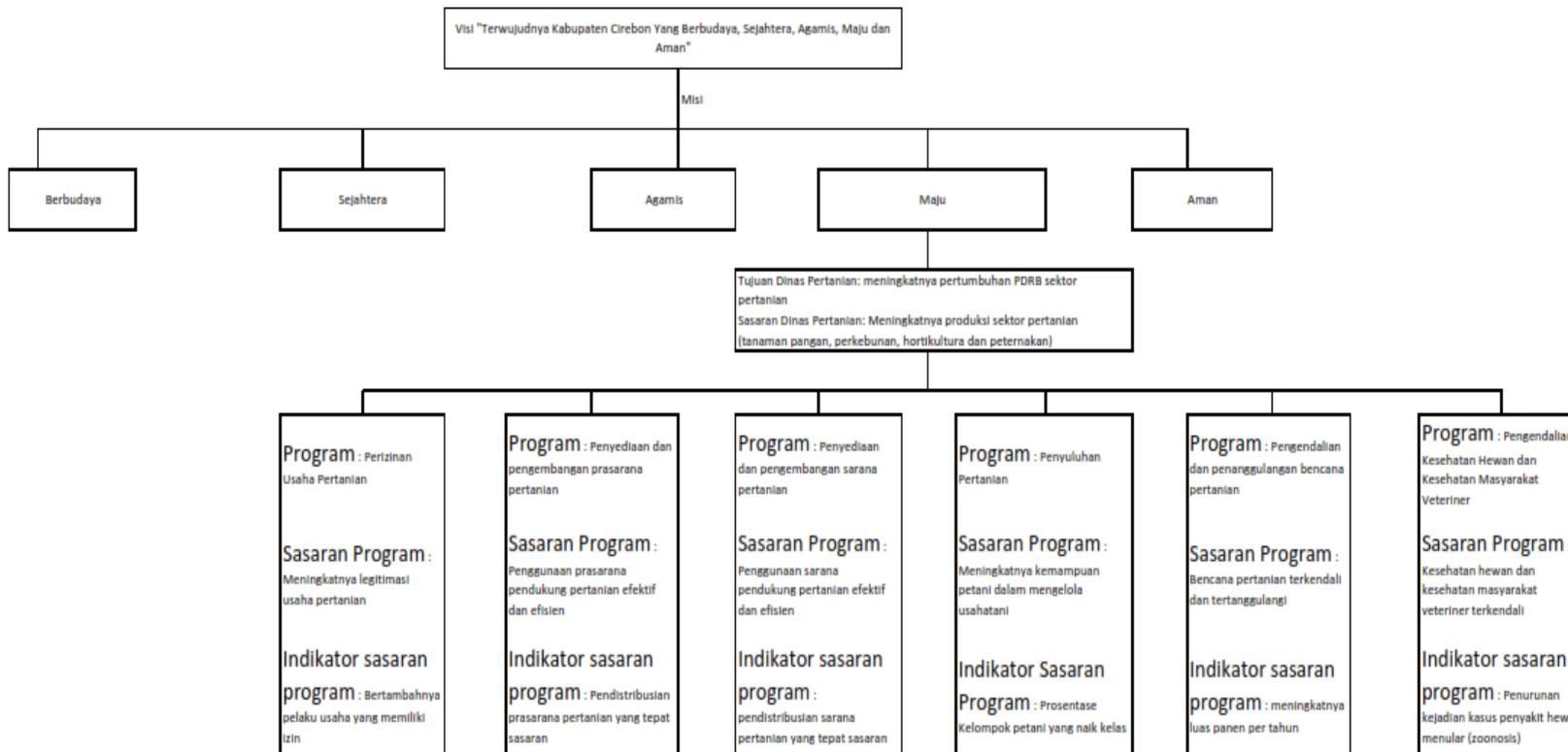
Dinas Pertanian memiliki 1 sasaran strategis, sedangkan urusannya ada dua yaitu : (1) Urusan Pertanian yang memiliki 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 20 (dua puluh) sub kegiatan; dan (2) Non urusan Pertanian memiliki 1 (satu) program, 6 (enam) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pertanian pada Tahun 2023 merupakan tahun ke-4 (empat) dari Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2019-2024. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan kinerja Dinas Pertanian Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis di Dinas Pertanian untuk meningkatkan produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan) memiliki nilai persentase capaian sebesar 85,51% dari target 548.414 ton, sedangkan realisasinya mencapai 468.974,92 ton.\

### 4.2. Rencana Tindak Lanjut

Merespon meningkatnya kebutuhan akan pangan akibat meningkatnya jumlah populasi serta menurunnya kualitas lingkungan maka perlu langkah strategi untuk menjaga produksi hasil pertanian, berkaitan dengan hal tersebut Dinas Pertanian mendorong untuk mengoptimalkan pengelolaan serta pemanfaatan lahan-lahan pertanian dengan menyiapkan konsep pengembangan kawasan pertanian, pengembangan korporasi petani serta penerapan pertanian berkelanjutan.

LAMPIRAN



Gambar 1. Cascading Dinas Pertanian